

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA TRIBULAN III

DINAS TENAGA KERJA

TAHUN 2022



DINAS TENAGA KERJA

JL. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546 Lumajang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. GAMBARAN UMUM.....	5
D. DASAR HUKUM.....	8
E. SISTEMATIKA	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	10
B. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2022	16
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	36
C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....	47
BAB IV PENUTUP.....	49

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 40 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 29 orang dan Tenaga Kerja Bulanan sebanyak 11 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Bulan September tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Kerja Bulanan Dinas Tenaga Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per bulan September Tahun 2022

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		Struktural		Non Struktural			
		PNS	%	Tenaga Kerja Bulanan	%		
1	Strata 2 (S 2)	5	17.24	-	-	5	12.5
2	Strata 1 (S 1)	10	34.48	6	54,55	16	40
3	Diploma 3	2	6.9	-	-	2	5
4	SLTA/SMK	11	37.93	3	27,27	14	35
5	SLTP			1	9,09	1	2.5
6	SD	1	3.45	1	9,09	2	5
J U M L A H		29	100	11	100	40	100

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan Per bulan September tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja
Berdasarkan Tingkat Golongan
Per bulan September Tahun 2022

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Golongan IV	9	0	9
2	Golongan III	12	0	12
3	Golongan II	7	0	7
4	Golongan I	1	0	1
Jumlah		29	0	29

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terbanyak pada jenjang golongan ruang III sebanyak 12 orang, hal tersebut disamping karena jenjang kepangkatan tersebut adalah jenjang kepangkatan maksimal, hal yang lain adalah tidak terakomodirnya jenjang kepangkatan tersebut pada jenjang jabatan di atasnya.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan
Per bulan September Tahun 2022

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	1
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	13
Jumlah		16

Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dirinci berdasarkan tingkat eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Tingkat Eselon
Per bulan September Tahun 2022

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)
1	II. B	1
2	III. A	1
3	III. B	4
4	IV. A	1
Jumlah		7

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Struktur Organisasi terdapat 7 Jabatan Struktural dan telah terisi semua.

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Per bulan September Tahun 2022

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Mobil	2	2	-	-
2	Sepeda Motor	16	16	-	-
3	Almari Kayu	5	5	-	-
4	Meja Kayu	7	7	-	-
5	Kursi Kayu	76	76		
6	Meja Tamu	3	3	-	-
7	Filing Cabinet	7	7	-	-
8	Komputer	7	7	-	-
9	Laptop	8	8	-	-
10	Kamera	2	1	-	1
11	OHP/LCD	1	1	-	-
12	AC	8	8	-	-
13	Brankas	1	1	-	-
14	Lemari Kaca	14	14	-	-
15	Kursi Putar	21	21	-	-
16	Kursi Besi/Lipat	25	25	-	-
17	Meja Komputer	4	4	-	-
18	Printer	15	15	-	-
19	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
	Dan seterusnya sesuai buku inventaris	-	-	-	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan aktivitas berdasarkan sub kegiatan-kegiatan-program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Misi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang secara umum dan menjadi kondisi strategis yang dikelola selama kurun waktu Tahun 2022, diantaranya adalah :

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022 (sd Tribulan III)
1	Penduduk Usia Kerja (>15 th) Jiwa	813.392	818.165	833.668	837.424	Data belum rilis dari BPS
2	Angkatan Kerja (>15 th) Orang	553.923	539.37	557.754	554.318	Data belum rilis dari BPS
3	TPAK (%)	68,10	65,92	66,92	66,19	Data belum rilis dari BPS
4	Penduduk Yang Bekerja (Orang)	539.8	524.189	539.007	534.879	Data belum rilis dari BPS
5	Penganggur Terbuka Orang)	14.123	15.181	18.747	19.439	Data belum rilis dari BPS
6	TPT (%)	2.55	2,81	3,36	3,51	Data belum rilis dari BPS
7	Jumlah Perusahaan	895	1.432	2.092	2.215	2.241
8	Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP	165	171	171	181	187
9	Jumlah Perusahaan yang wajib PP	785	785	785	785	785
10	Jumlah Perusahaan yang mempunyai tata kelola kerja yang layak	609	805	1308	1620	1635
11	Jumlah Perusahaan yang dimonitoring pengupahannya	100	100	100	50	50
14	Jumlah Perusahaan yang diinventarisir WLKP	46	32	28	7	5

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA
TRIBUNAL III TAHUN 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022 (sd Tribunal III)
16	Jumlah perusahaan yang dibina 5R	50	50	11	15	68
17	Jumlah perusahaan yang meningkat produktifitasnya	25	11	9	15	0
19	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	13	13	14	8	15
20	Jumlah kepesertaan BPJS TK	14.972	16.736	20.286	28.617	24.260
21	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	28.422	40.29	42.225	57.123	58.195
22	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	2.61	2.06	321	226	414
23	Jumlah Peserta Pelatihan	140	140	140	240	100
24	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	0	10	0	0	0
25	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	126	646	0	193	0
26	Jumlah PMI yang difasilitasi	292	277	267	105	33
27	Jumlah Penyuluhan Perlindungan PMI	1 kali (Desa Randuagung)	2 kali (Desa Pagowandan Desa Salak)	0	0	100 orang (anggaran Propinsi, 2 desa Ranuyoso dan Randuagung)
28	Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan melalui padat karya	500	200	1896	0	120
29	Jumlah LPKS	9	14	16	17	17
30	Jumlah LPKS yang melaporkan realisasi kegiatan pelatihan	5	4	4	5	12

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022 (sd Tribunal III)
31	Jumlah Transmigran	9 KK	7 KK	nihil	nihil	nihil
		(18 jiwa)	(21 jiwa)			

Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (diolah)

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh jajaran eselon III, eselon IV dan jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang meliputi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pada Penjelasan : Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, Bab II Pasal 2 bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang menjelaskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Tahun 2018–2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

VISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian mendukung Misi Ke 2 dari keseluruhan Misi Bupati Lumajang Yakni : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Misi tersebut diimplementasikan melalui tujuan Kedua : Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.

SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai Tujuan yang tertera pada RPJMD tersebut maka ditetapkan sasaran salah satunya adalah :

Meningkatnya Penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator awal sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari 2 indikator tersebut berproses pada penyesuaian Perubahan RPJMD yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengalami penyederhanaan indikator maka untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang awalnya mempunyai 2 indikator seperti yang disebutkan di atas menjadi mempunyai 1 indikator saja yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari Sasaran pada P-RPJMD tersebut kemudian ditetapkan menjadi Tujuan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya akan dilaksanakan secara berkesinambungan sejalan dengan Tujuan yang di tetapkan sebagaimana pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih
		Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif
		Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar

Penetapan Kebijakan

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program.

Tabel 2.2.
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program.

No.	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN PROGRAM
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Meningkatkan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif		
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Meningkatkan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang pelayanan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan koordinasi dan integrasi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta menjalankan konsultasi, mediasi, dan pembinaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

PROGRAM DAN PAGU ANGGARAN

Program terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program beserta pagu anggarannya sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 2.3
Program dan Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tribulan III Tahun
Anggaran 2022

Program			Anggaran
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	509,135,652
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	100,000,000
3	Program Hubungan Industrial	Rp.	33,764,000
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	21,000,000
5	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4,260,212,184
JUMLAH		Rp.	4,924,111,836

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Sumber dana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,924,111,836,-. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	509,135,652	DAU
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%			
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	47%	Program Penempatan Tenaga Kerja	100,000,000	DAU
				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4,260,212,184	DAU
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	68%	Program Hubungan Industrial	33,764,000	DAU
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	21,000,000	DAU
	JUMLAH				4,924,111,836	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2022

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x \leq 85$:	Baik
$55 \leq x \leq 70$:	Cukup Baik
$x \leq 55$:	Kurang Baik

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun 2022 sudah mengacu dan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2022.

Pencapaian tujuan “Meningkatnya penyerapan angkatan kerja” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu dengan target 2.75%, realisasi menunggu data rilis dari BPS. Indikator ini menunjukkan semakin rendah nilainya semakin baik, semakin kecil nilainya penyerapan angkatan kerja semakin banyak sehingga pengangguran yang ada semakin berkurang.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 5

indikator sasaran, secara rata-rata adalah sebesar 34.69% dengan kategori Kurang Baik.

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dengan Tujuan Meningkatnya penyerapan Angkatan Kerja direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja sd Tribulan III Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG	PENYEBUT	TARGET	REALISASI (sd Tribulan III)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	TUJUAN : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka			2.75%	Menunggu data rilis dari BPS
	SASARAN :					
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	0	0	100%	0.00
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	0	0	100%	0.00
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	416	414	47%	100.48
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1635	2241	68%	72.96
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0	0	100%	0.00

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)

1. Capaian Kinerja Perbandingan antara Target dan realisasi tahun pelaporan;

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam kerangka perbandingan antara target dengan realisasi sehingga diperoleh angka capaian kinerja Tahun 2022, sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Target dibanding Realisasi
sd Tribulan III Tahun 2022**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.75%	Menunggu data rilis dari BPS	-	Kurang baik
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	0.00%	0.00%	Kurang baik
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0.00%	0.00%	Kurang baik
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	47%	100.48%	213.79%	Sangat Baik
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	68%	72.96%	107.29%	Sangat Baik
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	0.00	0.00%	Kurang baik

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan indikator terdapat 4 indikator yaitu 1 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran. menunjukkan posisi kurang dalam rangkaian upaya pencapaian target p-renstra. Ada 2 Indikator yaitu Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan, dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, dengan capaian berkategori “Sangat Baik”.

2. Capaian Kinerja Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu;

**Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja antara Capaian Kinerja Tahun 2022
dibanding dengan Tahun 2021 dan tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA LAMA	CAPAIAN 2020	INDIKATOR KINERJA BARU	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6
A	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	34.48%	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	25.37%	Menunggu data rilis dari BPS
B	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	96.01%			
1	Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	117.65%	1. Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	~	0.00%
2	Prosentase pencari kerja di tempatkan	61.14%	2. Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0.00%
3	Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	78.53%	3. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	286.65%	213.79%
4	Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	2.98%	4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	108.49%	107.29%
			5. Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)

Terdapat perubahan dan penambahan Indikator Kinerja pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Indikator Kinerja yang lama untuk tujuan berjumlah 2, pada perubahan Renstra menjadi 1 tujuan. Indikator sasaran yang lama berjumlah 4 sedangkan Indikator Kinerja baru berjumlah 5.

3. Capaian Kinerja Perbandingan antara capaian kinerja tahun pelaporan dengan Target akhir tahun perencanaan;

**Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibanding dengan Akhir Tahun Perencanaan (2023)**

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SD TRIBULAN III TH. 2022	TARGET TH. 2023
-1	-2	-3	-4	-5
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menunggu data rilis dari BPS	2.50%
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	0.00%	100%
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	0.00%	100%
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100.48%	48%
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	72.96%	69%
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	0.00%	100%

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 (data di olah)

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 yang dibandingkan dengan target tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 1 indikator tujuan yang belum dapat diukur karena menunggu data rilis dari BPS dan 3 indikator sasaran yang tidak mencapai target. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **TUJUAN** : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja, dengan Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data Tingkat Pengangguran Terbuka bersumber dari BPS dan untuk realisasi TPT tahun 2022 rilis pada awal tahun 2023. Sehingga sampai dengan tribulan III tahun 2022 data belum dapat disajikan.

b. **SASARAN**

Dari kelima capaian indikator sasaran terdapat 3 indikator dengan capaian minus pada evaluasi tingkat efisiensi. Adapun penjelasan Tabel 3.7 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja yang terlatih dengan capaian kinerja 0.00% dan capaian anggaran 1.21% sehingga tingkat efisiensi -1.21%.

Indikator ini didukung dengan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Kegiatan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi belum dapat dilaksanakan pada tribulan III tahun 2022, hal ini dikarenakan menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri terkait nomenklatur baru pada OPD pengampu serta terjadi pergeseran anggaran awal dari Rp. 483.439.020,00 dengan adanya penambahan silpa sebesar Rp. 566.005.923,00 menjadi Rp. 1.049.444.948,00 pada bulan September 2022 sehingga harus mengalami pergeseran anggaran melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2022. Dinas Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan BLK

Jember untuk memfasilitasi instruktur pelatihan serta sarana (peralatan) yang dibutuhkan selama pelatihan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut :

- berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Lumajang, BPKD, BAPPEDA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, Bagian Biro Setda. Propinsi Jawa Timur serta Kementerian Tenaga Kerja untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- Berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa
- menyiapkan sasaran dan jenis pelatihan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
- Bersinergi dengan bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait layanan AK-1 (Kartu pencari kerja).

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada tribulan III 2022 sesuai time schedule dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus dan September 2022, dengan serapan anggaran tiap bulan sebesar Rp. 600.000,00. Hal ini dikarenakan anggaran perjalanan dinas hanya untuk 2 orang, sisa satu anggaran perjalanan dinas yang akan kami serap untuk tribulan selanjutnya. Terdapat beberapa LPK yang pada saat kunjungan pembinaan tidak berada ditempat sehingga data yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi. Dari pembinaan yang telah kami lakukan terdapat LPK yang telah habis masa ijin operasionalnya dan aktif perijinan dibawah binaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sebanyak 2 LPK sedangkan 2 LPK masih aktif tetapi terdapat 1 LPK yang ijin usahanya KLBI harus dirubah menjadi LPK karena dalam ijin usaha KLBI berbunyi LPK.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut :

- melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan time schedule yang telah dijadwalkan serta mendorong LPK untuk memproses lembaganya menjadi lembaga yang terakreditasi.
- Merubah metode pembinaan yang dari kunjungan ke LPK dijadikan pertemuan/janji/rapat koordinasi di dinas.

2. Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Produktif dengan capaian kinerja 0% dan capaian anggaran 65.42% sehingga tingkat efisiensi -65.42%.

Pencapaian indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil. Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas target 70 perusahaan dan terealisasi 68 perusahaan. Pelaksanaan kegiatan ini melalui monitoring ke perusahaan sekaligus memberikan konsultasi terkait peningkatan produktifitas di perusahaan serta mengadakan sosialisasi dengan mengundang perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja.

Produktivitas tenaga kerja mengacu pada output yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Semakin produktif pekerja maka akan semakin banyak barang dan jasa yang mereka hasilkan. Produktivitas yang tinggi memungkinkan perusahaan membayar upah lebih tinggi dengan tetap menghasilkan laba yang tinggi. Ini meningkatkan pendapatan yang mengarah ke perbaikan standar hidup dan kesejahteraan.

3. Indikator Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan dengan capaian kinerja sebesar 213.79% dan capaian anggaran 61.05% sehingga tingkat efisiensi 152.74% .Realisasi kinerja didapatkan dari data Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 416 dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebesar 414. Capaian kinerja ini didukung oleh Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui Program AKL (Antar Kerja Lokal) dengan target 100 orang dan realisasi 123 orang sehingga capaian kinerja 123%. Realisasi 123 orang adalah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL dan AKAD yang merupakan hasil fasilitasi perekrutan yang dilakukan oleh PT. Alamindo sebanyak 3 orang, PT. PNM Mekar sebanyak 24 orang, PT. Insan Mulia sebanyak 3 orang, PT. Khairtex Indonesia sebanyak 8 orang, BTPN Syariah sebanyak 29 orang dan Gojek sebanyak 56 orang.

Realisasi anggaran kegiatan Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota yaitu berupa pelaksanaan kegiatan padat karya dilaksanakan

pada tribulan I tahun 2022 pada APBD Murni dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.790.000,00 atau sebesar 99.58% dan menyerap tenaga kerja sementara sebanyak 120 orang dari target sebanyak 100 orang dengan capaian kinerja sebesar 120%.

Dengan adanya kondisi yang tidak terduga dan tidak direncanakan sebelumnya dan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 di dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu Belanja Wajib Perlindungan Sosial adalah Penciptaan Lapangan Kerja. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja bahwa implementasi belanja wajib penciptaan lapangan kerja yaitu berupa kegiatan Padat Karya yang dilaksanakan di 205 Desa/Kelurahan se Kabupaten Lumajang, karena pada dasarnya semua masyarakat terkena dampak inflasi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, langkah-langkah yang telah kami laksanakan sebagai berikut :

- Membuat Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900/2214/427.73/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Permintaan Data Belanja Penanganan Dampak Sosial, kami tindaklanjuti dengan bersurat kepada 205 Desa/Kelurahan melalui Kecamatan untuk mengirimkan data calon pekerja padat karya dampak inflasi sejumlah 25 orang per desa dengan criteria sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menyusun Petunjuk Teknis Padat Karya Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor : 188.45/430/427.51/2022 tanggal 13 September 2022 yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

- Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang Penunjukan Petugas Lapangan Padat Karya Nomor : 188.45/431/427.51/2022 tanggal 14 September 2022.

Disamping kegiatan yang didanai APBD, terdapat beberapa Program Perluasan Kesempatan Kerja yang dananya bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja melalui dana APBN dengan prosedur pengajuan proposal untuk diupload melalui aplikasi Bizhub diantaranya :

- Padat Karya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pada tahun ini dibuka pengajuan proposal Padat Karya ke Kementerian Tenaga Kerja melalui aplikasi Bizhub sampai akhir bulan Juli 2022.
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bertujuan untuk dapat mengakomodir masyarakat pencari kerja yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2022 ini dibuka pengajuan proposal Tenaga Kerja Mandiri Pemula ke Kementerian Tenaga Kerja melalui aplikasi Bizhub sampai bulan September 2022.
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan merupakan Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang pernah mendapatkan program perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja.
- Tenaga Kerja Sukarela (TKS) merupakan tenaga kerja perseorangan yang memenuhi syarat untuk mendampingi Tenaga Kerja Mandiri dalam mengelola bantuan Pemerintah.
- Unit Layanan Disabilitas merupakan mandatory dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Unit Layanan Disabilitas harus dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan untuk Kabupaten Lumajang sudah terbentuk dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/259/427.12/2022 Tanggal 26 April 2022, pada tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut :

- Petugas lapangan padat karya selalu berkoordinasi dengan Desa untuk menetapkan dan memastikan peserta padat karya yang

diusulkan desa dan penentuan ketua kelompok serta lokasi kegiatan yang menjadi sasaran pembersihan.

- Pelaksanaan padat karya pada 205 desa/kelurahan direncanakan mulai tanggal 17 Oktober sampai dengan 3 Desember 2022.
- Karena anggaran kegiatan Padat Karya Dampak Inflasi masuk periode Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun 2022 sehingga capaian kinerja baru dapat direalisasikan pada tribulan IV atau baru dapat diukur di akhir tahun anggaran.
- Dinas Tenaga Kerja pada tahun ini berupaya mengawal dan melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau UPT yang ditunjukoleh Kementerian Tenaga Kerja untuk menangani usulan program yaitu berupa kegiatan Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula dan terdapat usulan untuk kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebanyak 3 kelompok dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula sebanyak 36 kelompok, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan dan Tenaga Kerja Sukarela.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok dari desa maupun kelurahan yang telah mengajukan proposal melalui aplikasi Bizhub KE Kementerian Tenaga Kerja.

b. Pengelolaan informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Data Pasar Kerja. Realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2022 adalah 5 dokumen dari target 6 dokumen atau capaian 83.33%. Sedangkan untuk target pencari kerja yang ditempatkan melalui Job Fair target sejumlah 150 orang dan realisasi 0 orang atau sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Job Fair Mini sampai dengan Tribulan III belum dapat dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2022.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.662.869,00 atau 10.65%. Realisasi anggaran sampai dengan Tribulan III tahun 2022 ini dipergunakan untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Job Fair dan berkoordinasi

dengan perusahaan terkait kesediaan untuk mengikuti Job Fair yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2022.

Disamping pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan beberapa aktivitas yang belum didukung oleh anggaran yang memadai diantaranya :

- Pelayanan Informasi Pasar Kerja skala Kabupaten
- Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan dilakukan setiap ada pencari kerja yang mengambil AK 1
- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) yang merupakan sistem penempatan tenaga kerja dalam satu daerah kabupaten
- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan sistem penempatan tenaga kerja antar daerah antar provinsi. Pada tahun ini terdapat rekrutmen penempatan ke luar provinsi
- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) merupakan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri, setiap hari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang melakukan pelayanan penerbitan Rekom ID untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan ditempatkan
- Pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan kerja
- Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan mendata perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan BPKD terkait pergeseran anggaran pada saat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun 2022.
- Koordinasi untuk Pendataan Pemberi kerja/pengusaha yang mengikuti kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.
- Selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur terkait jadwal pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2022.

c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi dengan target sejumlah 50 orang (untuk pemulangan PMI) dan sampai dengan tribulan III terealisasi sejumlah 33 orang, atau capaian kinerja sebesar 66.00%. Jumlah anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.594.500,00 atau sebesar 34.38%. Realisasi anggaran ini digunakan untuk memfasilitasi pemulangan atau penjemputan Pekerja Migran Indonesia bermasalah baik deportasi, sakit ataupun pemulangan jenazah.

Untuk memfasilitasi pemulangan PMI dari anggaran yang tersedia sebenarnya sangat kurang, anggaran ini hanya bisa digunakan untuk pemulangan dari Kabupaten ke daerah asal atau desa setempat dan keluarganya, padahal pemulangan PMI bermasalah ini yang terjadi sangat bervariasi kondisinya sehingga untuk proses pemulangan ini kami harus berkoordinasi dan meminta bantuan kepada beberapa pihak seperti KBRI/KJRI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui UPT P2TK, Dinas Sosial dan PPPA, Dinas Kesehatan dan P2KB, Rumah Sakit Haryoto, Kecamatan, Pemerintah Desa atau keluarga PMI.

Karena kondisi saat ini sudah berangsur-angsur pulih dari masa pandemi sehingga pemulangan PMI tidak sebanyak pada saat pandemi.

Indikator Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi ini sebenarnya tidak hanya memfasilitasi pemulangan PMI tetapi Dinas Tenaga Kerja juga memfasilitasi penerbitan Rekom ID Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum penempatan dan sampai dengan tribulan III tahun 2022 telah menerbitkan rekom sejumlah 293 orang.

Rencana Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan sebagai berikut :

- Dalam penanganan pemulangan dan penjemputan Pekerja Migran Indonesia, selalu berkoordinasi dengan KBRI/KJRI, BP2MI, UPT P2TK Propinsi Jawa Timur, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan P2KB, RS. Haryoto, Kecamatan, Desa dan Keluarga PMI.
- Melakukan sosialisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia terutama di daerah kantong PMI Ilegal, diawali dari Pemerintah Desa,

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja dan bisa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) karena banyak sekali PMI Ilegal dibandingkan dengan PMI Legal. Hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman masyarakat terhadap sisi positif dan negatifnya ketika menjadi PMI diluar negeri dan masyarakat hanya berpikir pendek bagaimana bisa segera berangkat dengan janji-janji manis dari para Tekong. Dan apabila menjadi PMI Legal masih harus melalui beberapa prosedur.

- Melakukan pembinaan dan monitoring ke Desa Migran Produktif yang merupakan desa kantong PMI Ilegal yang mendapatkan bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja bagi PMI Purna dengan harapan bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menjadi PMI yang berangkat secara prosedural.
 - Melakukan monitoring sekaligus pendataan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kelurahan/Desa yang merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat basis data PMI.
4. Indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan capaian kinerja sebesar 107.29% dan capaian anggaran 40.99% sehingga tingkat efisiensi 66.30%. Realisasi didapatkan dari data Jumlah Perusahaan yang mempunyai PP/PKB/ LKS Bipartit/ Struktur Skala Upah/ terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1.635 dan data Jumlah Perusahaan di Kabupaten Lumajang sebesar 2.241. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sebagai berikut :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- Jumlah pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama selama tahun 2022 dengan target 40 dokumen, sampai dengan Tribulan III tahun 2022 terealisasi sebanyak 21 dokumen atau 52.50%. Angka capaian 52.50% tersebut dapat dikatakan masih rendah dari taerget yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena :

- Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya dan manfaat adanya PP dan PKB.
- Kurang disiplinnya atau rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
- Adanya pergantian HRD lama dengan HRD baru, sehingga perubahan atau pembaharuan PP atau PKB tidak tertangani karena ketidaktahuan HRD yang baru.
- Kurang sebandingnya jumlah dan kemampuan Pembina (utamanya mediator) dengan jumlah perusahaan yang dibina, sehingga dalam melaksanakan pembinaan kurang maksimal.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan monitoring langsung ke lokasi perusahaan maupun melalui surat pemanggilan untuk dilakukan pembinaan secara desk dan terjadwal, dengan harapan perusahaan akan menyadari dalam mematuhi syarat kerja ketenagakerjaan khususnya dalam pembuatan PP dan PKB sehingga pencapaian target dapat terlaksana.

- b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah kasus perselisihan yang sudah terfasilitasi baik melalui mediasi maupun bipartite intern perusahaan sebanyak 15 perkara dari target 15 perkara atau sebesar 100%. Capaian tersebut dikarenakan banyaknya kasus perselisihan yang dilaporkan dan sudah tertangani. Penyebab banyaknya kasus dikarenakan kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dalam pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit dalam perusahaan. Adapun jenis perkara yang telah tertangani antara lain :

1. Perselisihan hak terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak
2. Perselisihan hak terkait penahanan ijazah
3. Perselisihan hak terkait kurang bayar terhadap THR
4. Perselisihan hak terkait belum dibayarnya gaji/upah dan BPJS Tenaga Kerja

5. Perselisihan hak terkait belum mendapatkan uang pesangon atau kompensasi setelah dilakukan PHK

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja (pemilik perusahaan) dengan pekerja/karyawan melalui mediasi untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

c. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Lumajang terkait manfaat program jamsostek ke perusahaan diharapkan akan bertambahnya kepesertaan jamsostek. Selama tribulan III tahun 2022 jumlah pekerja yang terfasilitasi jamsostek dan kesejahteraan pekerja sebanyak 24.260 orang dari target 60.000 orang atau 40.43%. Masih rendahnya tingkat capaian diatas dari target yang telah ditentukan dikarenakan :

- Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja akan pentingnya manfaat dalam keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan.
- Adanya ketidakpatuhan pengusaha terhadap peraturan pemerintah khususnya dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mana merupakan kewajiban bagi pengusaha.
- Kurangnya sosialisasi terkait manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terkait program ketenagakerjaan ke perusahaan.

5. Indikator Persentase penempatan transmigran sesuai standar dengan capaian kinerja 0.00% dan capaian anggaran 0.00% sehingga tingkat efisiensi 0.00%.

Kinerja ini didukung oleh Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah KK

Transmigran ditempatkan dengan target 2 KK dan terealisasi 0 KK. Capaian kinerja 0%.

Sesuai dengan time schedule yang telah dibuat, pelaksanaan kegiatan pada tribulan IV tahun 2022. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait pemberangkatan calon transmigrasi untuk Kabupaten Lumajang tahun 2022. Kabupaten Lumajang mendapatkan jatah kuota calon transmigran sebanyak 2 KK dengan daerah tujuan yaitu Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan menunggu proses penyelesaian lahan transmigrasi di daerah tujuan serta layak huni, layak usaha dan layak berkembang. Pada tribulan III tahun 2022 kegiatan yang dilakukan adalah monitoring daerah penempatan transmigran tahun 2019, hasil monitoring transmigran telah berhasil dilokasi penempatan dan mendapatkan lahan akan tetapi pemberian lahan terealisasi di tahun ketiga setelah penempatan yang mana tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tertuang dalam KSAD. Selain melakukan monitoring sekaligus melakukan penjajakan lokasi calon transmigran rencana pemberangkatan tahun 2022. Hasil penjajakan lokasi rumah calon transmigran tidak layak karena belum ada MCK, SAB dan listrik belum masuk.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah menyiapkan calon transmigran, terutama mental bila bekerja di lahan transmigrasi serta memotivasi untuk dapat berkarya dan berkembang. Dan memastikan kesiapan daerah penempatan calon transmigran dengan koordinasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan anggaran yang cukup pada tahun 2022. Efisiensi atas capaian setiap sasaran dan anggaran pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Anggaran sd Tribulan III Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	0.00%	0.00	491,135,652	5,957,500	1.21	-1.21
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	0.00%	0.00	18,000,000	11,775,000	65.42	-65.42
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	47%	100.48%	213.79	100,000,000	61,047,369	61.05	152.74
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	68%	72.96%	107.29	33,764,000	13,839,000	40.99	66.30
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	0.00%	0.00	21,000,000	-	0.00	0.00

Dari tabel tersebut diatas, dari lima sasaran terdapat tiga sasaran yang tidak efisien dan dua sasaran menunjukkan efisien dengan efisiensi tertinggi pada sasaran Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,924,111,836,- dan realisasi total belanja daerah sebesar Rp. 2,993,499,512,- (Dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas 5 program pada tahun 2022 sebesar 60.79%.

Prinsip dasar penetapan alokasi anggaran adalah kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja terhadap masing-masing sasaran :

Tabel 3.6
Persentase Alokasi Anggaran Belanja Daerah sd Tribulan III Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	SERAPAN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	491,135,652	5,957,500	1.21
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	18,000,000	11,775,000	65.42
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100,000,000	61,047,369	61.05
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	33,764,000	13,839,000	40.99

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	SERAPAN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	21,000,000	-	0.00
Jumlah			663,899,652	92,618,869	13.95
Persentase Alokasi Anggaran Program Pendukung					
NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	SERAPAN	SERAPAN (%)
			(Rp)	(Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	4,260,212,184	2,900,880,643	68.09
Total Pagu Anggaran			4,924,111,836	2,993,499,512	60.79

1. Persentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran

**Tabel 3.7
Persentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran sd Tribulan III Tahun 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dilatih	100%	0%	0%	509,135,652	17,732,500	3.48	DAU & DBHCHT
		Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%	0%	0%				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	100 orang	0 orang	0%	483,438,902	-	0.00	DBHCHT
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 orang	0 orang	0%	483,438,902	-	0.00	DBHCHT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	70.59%	70.59%	7,696,750	5,957,500	77.40	DAU
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	17 Lembaga	12 Lembaga	70.59%	7,696,750	5,957,500	77.40	DAU
	Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	97.14%	97.14%	18,000,000	11,775,000	65.42	DAU
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	70 perusahaan	68 perusahaan	97.14%	18,000,000	11,775,000	65.42	DAU
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	47%	100.48%	213.79%	100,000,000	61,047,369	61.05	DAU
1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	100 orang	123 orang	123%	50,000,000	49,790,000	99.58	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 orang	120 orang	120%	50,000,000	49,790,000	99.58	DAU
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dikelola	6 dokumen 150 orang	5 dokumen 0 orang	83.33% 0%	25,000,000	2,662,869	10.65	DAU
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair / Bursa Kerja</i>	150 orang	0 orang	0%	25,000,000	2,662,869	10.65	DAU
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	50 orang	33 orang	66%	25,000,000	8,594,500	34.38	DAU
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 orang	33 orang	66%	25,000,000	8,594,500	34.38	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	23.82%	99.25%	33,764,000	13,839,000	40.99	DAU
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 perkara	15 perkara	100.00%	33,764,000	13,839,000	40.99	DAU
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	15 perkara	15 perkara	100.00%	9,764,000	4,322,000	44.26	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60000 orang	24260 orang	40.43%	24,000,000	9,517,000	39.65	DAU
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	0%	0%	21,000,000	-	0.00	DAU
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	2 KK	0 KK	0%	21,000,000	-	0.00	DAU
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	0 Laporan	0%	21,000,000	-	0.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	74.43%	74.43%	4,260,212,184	2,900,880,643	68.09	DAU
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79.93%	79.93%	3,552,947,384	2,453,878,516	69.07	DAU
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	28 orang	84.85%	3,501,931,384	2,423,400,516	69.20	DAU
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	9 dokumen	75%	51,016,000	30,478,000	59.74	DAU
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	77.08%	77.08%	265,079,000	158,533,832	59.81	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	9,907,590	9,907,590	100.00	DAU
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	79,749,230	79,749,230	100.00	DAU
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	33.33%	24,370,180	9,427,680	38.69	DAU
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	9 laporan	75%	151,052,000	59,449,332	39.36	DAU
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	75%	75%	320,035,600	233,879,126	73.08	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9 laporan	75%	64,882,000	43,816,145	67.53	DAU
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	9 laporan	75%	255,153,600	190,062,981	74.49	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	65.72%	65.72%	122,150,200	54,589,169	44.69	DAU
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	12 unit	60.00%	103,200,200	41,339,169	40.06	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	20 unit	71.43%	18,950,000	13,250,000	69.92	DAU
	TOTAL PAGU ANGGARAN					4,924,111,836	2,993,499,512	60.79	

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang diperoleh melalui penilaian kinerja selama kurun waktu sampai dengan Tribulan III Tahun 2022, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih sering terjadi penyempurnaan/perbaikan sistem administrasi baik keuangan dan sebagainya terkait perubahan peraturan perundang-undangan, hal tersebut cukup menghambat pelaksanaan tugas;
- b. Keterbatasan jumlah personil serta kompetensinya melaksanakan jabatan fungsional, sarana dan prasarana dan anggaran sudah pasti mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak maksimal;
- c. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dalam pelaksanaan semua kegiatan terutama terkait pelatihan kompetensi yang bersumber dana DAU;
- d. Pemerintah Daerah belum memiliki BLK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang belum terakreditasi, menyebabkan kesulitan melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi yang terstandart;
- e. Luncuran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait pendirian BLK Komunitas di beberapa Pondok Pesantren yang tidak melalui Diinas Tenaga Kerja kabupaten;
- f. Belum ada turunan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yaitu berupa Peraturan Bupati Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Bupati Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
- g. Masih rendahnya pembinaan dan perlindungan terhadap PMI ;
- h. Pemberangkatan serta penempatan calon transmigran menyesuaikan dengan jadwal dari propinsi dan pusat serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi ;
- i. Belum optimalnya sistem pengelolaan data base tenaga kerja daerah;
- j. Perusahaan enggan memberikan data riil baik terkait jumlah tenaga kerjanya, hasil produksinya modal awal dan laba perusahaan, termasuk kewajiban dalam mengisi aplikasi WLKP.

Dari permasalahan yang dihadapi maka diambil langkah- langkah strategi dan kebijakan pemecahan masalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyelesaikan semua beban tugas dilakukan dengan cara memaksimalkan personil yang ada, merencanakan pemberangkatan pelatihan kompetensi Jabatan Fungsional;

- b. melakukan advokasi terkait Pelatihan dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) serta dinas pendidikan yg membawahi SMK/SMA serta Kementerian Agama yang membawahi Pondok Pesantren atau Madrasah;
- c. Mengusulkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Bupati Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
- d. Melakukan sinergitas program dimulai dari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, LSM, OPD, Pemerintahan Desa terkait serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ;
- e. Melakukan sosialisasi ke Perusahaan terkait pentingnya pengukuran produktivitas tenaga kerja, memberikan data lowongan serta memberikan data riil jumlah karyawan serta mengikuti norma yg berlaku terkait kesejahteraan pekerja serta hubungan Industrial. Sinergitas dengan OPD terkait;
- f. Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan antar lembaga baik horizontal maupun vertikal ;
- g. Melakukan koordinasi secara aktif dengan propinsi maupun pusat terkait penempatan catrans serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi;
- h. Optimalisasi aplikasi SIMNAKER yg perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan aplikasi Kementerian Tenaga Kerja yaitu SISNAKER guna memperbaiki data ketenagakerjaan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Indikator Kinerja ribulan III Tahun 2022 dapat disimpulkan dengan hasil Kurang Baik, namun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribulan III Tahun 2022 masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2022 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, Oktober 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2018-2023

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			1	2	3	4	5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Indikator Tujuan : Pengangguran Terbuka Tingkat	3,36%	2,81%	3,36%	3,00%	2,75%	2,50%	2,50%
1	Prosentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Tenaga Kerja yang Produktif	81,82%	100%	81,82%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	122,90%	125,70%	122,90%	46%	47%	48%	48%
4	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	62,52%	56,22%	62,52%	67%	68%	69%	69%
5	Prosentase penempatan transmigran sesuai standar	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ROSYIDAH

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 14 Nopember 2022

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Pihak Pertama,

dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%
2.	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%
3.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	47%
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	68%
5.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigran sesuai Standar	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 1,080,141,698	DAU & DBHCHT
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 2,452,838,000	DAU
3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 33,764,000	DAU
4. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 49,499,944	DAU
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp 4,141,716,647	DAU
JUMLAH	Rp. 7,757,960,289	

Lumajang, 14 Nopember 2022

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009